

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Media Sosial sebagai Ruang Kampanye

Media sosial sekarang bukan hanya tempat untuk bersosial atau berbagi foto liburan tetapi sudah merambah menjadi ruang penting dalam politik, terutama menjelang Pemilu 2024. Banyak kampanye memakai media sosial agar pesan bisa cepat tersebar, masyarakat lebih aktif, dan calon pemimpin bisa menyampaikan atau mendengar aspirasi publik.

2.1.1. Data dan Tren Penggunaan Internet & Media Sosial di Indonesia

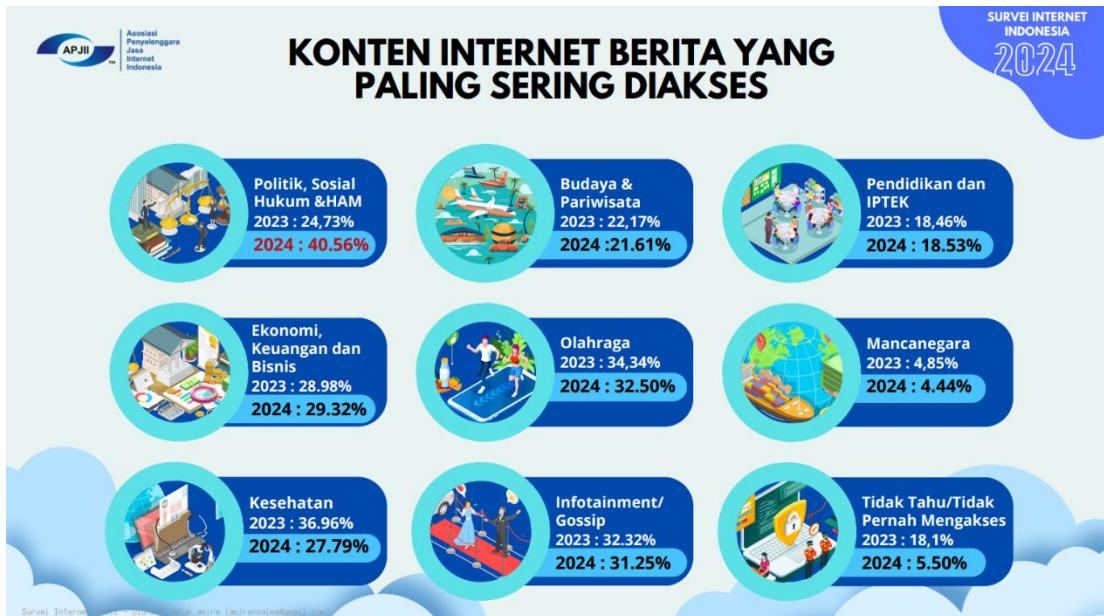
Pada awal tahun 2024, tercatat 185,3 juta orang di Indonesia memakai internet, atau sekitar 66,5% dari total populasi. Angka ini menunjukkan penetrasi internet sudah cukup tinggi. Dari jumlah pengguna internet tersebut, sekitar 139 juta identitas pengguna media sosial YouTube aktif pada Januari 2024, atau sekitar 49,9% dari total populasi. Penggunaan perangkat seluler sangat dominan, bahkan koneksi seluler aktif mencapai 353,3 juta unit, yang artinya satu orang bisa punya lebih dari satu perangkat/koneksi.

Rata-rata waktu yang dihabiskan orang Indonesia di media sosial juga tinggi. Misalnya, dari data Digital Indonesia 2024, rata-rata penggunaan media sosial adalah sekitar 3 jam 11 menit per hari. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi bagian dari aktivitas harian masyarakat.

2.1.2. Peran Media Sosial dalam Kampanye Politik

Karena banyak orang yang aktif di media sosial dan menghabiskan waktu cukup lama di situ, calon politisi dan tim kampanye melihat media sosial sebagai tempat yang efektif untuk menjangkau publik, terutama generasi milenial dan Gen

Z. Media sosial memungkinkan pesan tersiar secara cepat lewat teks, gambar, video, live streaming, dan interaksi publik (komentar, share, like).



Gambar 2.1.1. Konten Internet Berita Yang Paling Sering Diakses Tahun 2024

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

Media sosial sekarang menjadi salah satu arena paling penting untuk kampanye politik di Indonesia. Hal ini didukung oleh data terbaru Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024 yang menunjukkan bahwa konten berita tentang politik, sosial, hukum, dan HAM adalah yang paling sering diakses masyarakat, yaitu mencapai 40,56%, mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2023 yang hanya 24,73%. Kenaikan ini menunjukkan bahwa menjelang Pemilu 2024, perhatian masyarakat terhadap isu politik dan hukum meningkat sangat signifikan, bahkan mengalahkan konten lain seperti olahraga (32,50%), infotainment/gossip (31,25%), dan kesehatan (27,79%).

Peningkatan minat masyarakat terhadap isu politik ini mendorong politisi untuk memanfaatkan strategi digital marketing communication dalam kampanye. Strategi ini tidak hanya berbentuk kampanye formal, tetapi juga dikemas secara kreatif dan menarik, dengan pendekatan emosional maupun visual agar lebih mudah disebarkan. Banyak politisi di Indonesia sudah mulai menerapkan cara ini untuk memperkuat citra mereka di ruang digital.

Selain itu, media sosial juga menjadi ruang untuk mengelola opini publik secara lebih intensif. Misalnya, seperti aplikasi X terdapat indikasi pergerakan pasukan siber (*cyber troops*) yang berfungsi menyebarkan opini tertentu atau melawan narasi dari pihak lawan. Hal ini memperlihatkan bahwa kampanye digital bukan sekadar pelengkap, melainkan strategi yang serius digunakan dalam kontestasi politik.

Media sosial memberikan kesempatan interaksi langsung antara publik dengan calon pemimpin. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau aspirasi secara terbuka, lalu calon bisa memberikan tanggapan secara cepat. Situasi ini membentuk kesan bahwa calon lebih transparan, interaktif, dan dekat dengan masyarakat, sesuatu yang sulit diwujudkan melalui kampanye tradisional.

2.2. Profil Figur Ganjar Pranowo dan Mahfud MD



Gambar 2.2.1. Profil Ganjar Pranowo dan Mahfud MD

Sumber: <https://pemilu.tanahlautkab.go.id/assets/03.png>

Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD diposisikan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda namun saling melengkapi. Ganjar Pranowo merepresentasikan figur eksekutif dengan pengalaman banyak di pemerintahan daerah dan politik elektoral, sementara Mahfud MD dikenal sebagai figur dengan otoritas kuat di bidang hukum dan ketatanegaraan. Perpaduan ini membentuk gambaran kepemimpinan yang mengombinasikan kemampuan teknis pemerintahan, pengalaman dalam politik praktis, serta citra sebagai figur yang

menjunjung nilai moral dan hukum, yang kemudian menjadi kekuatan penting dalam persaingan politik di tingkat nasional.

2.2.1. Profil Ganjar Pranowo

Ganjar Pranowo, yang memiliki nama lahir Ganjar Sungkowo, lahir pada 28 Oktober 1968 di Karanganyar, Jawa Tengah. Ia berasal dari keluarga sederhana, ayahnya bernama S. Pamudji Pramudi Wiryo yang berprofesi sebagai polisi, sementara ibunya, Sri Suparni, mengelola usaha kecil untuk membantu ekonomi keluarga. Nama “Sungkowo” kemudian diganti menjadi “Pranowo” ketika ia memasuki sekolah, sebuah tradisi dalam masyarakat Jawa yang bertujuan memberi makna lebih baik dalam kehidupan seorang anak. Latar belakang keluarga yang sederhana membentuk kepribadian Ganjar sebagai sosok yang pekerja keras dan dekat dengan masyarakat kecil.

Dalam hal pendidikan, Ganjar menempuh jenjang sarjana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, tempat ia mulai aktif di dunia pergerakan mahasiswa, khususnya dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Ketertarikannya pada isu politik kian menguat seiring dinamika era Reformasi. Setelah itu, ia melanjutkan studi pascasarjana di Universitas Indonesia (UI) dan meraih gelar Magister Ilmu Politik. Aktivitas akademis dan organisasinya menjadi bekal penting dalam perjalanan karier politiknya kelak.

Karier politik Ganjar dimulai saat ia berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI pada 2004 dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII melalui PDI Perjuangan. Ia menjabat selama dua periode hingga 2013. Kiprahnya semakin menanjak ketika ia maju dalam Pilkada Jawa Tengah 2013 dan terpilih sebagai Gubernur. Ia kembali

dipercaya memimpin Jawa Tengah untuk periode kedua setelah memenangkan Pilkada 2018 dengan perolehan suara lebih dari 58 persen. Selama sepuluh tahun memimpin Jawa Tengah, Ganjar dikenal sebagai gubernur yang gemar turun langsung ke lapangan, berdialog dengan masyarakat, dan menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi serta transparansi kebijakan.

Meski dikenal dengan gaya kepemimpinan yang merakyat, Ganjar tidak lepas dari kritik. Salah satu sorotan publik muncul pada kasus Wadas di Purworejo, ketika terjadi konflik sosial terkait penambangan batu andesit dan pembebasan lahan. Selain itu, sikapnya yang menentang kehadiran tim Israel di Piala Dunia U-20 juga memicu polemik, karena keputusan FIFA kemudian mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah. Namun demikian, di mata banyak pengamat, Ganjar tetap dianggap sebagai politisi dengan rekam jejak yang relatif bersih dari kasus korupsi besar, dan reputasinya tetap kuat terutama di kalangan generasi muda dan masyarakat Jawa Tengah.

Dalam hal politik, Ganjar mengusung isu pembangunan pertanian, peningkatan kesejahteraan petani, serta program bantuan bagi usaha mikro dan layanan publik. Gaya komunikasinya yang lugas dan terbuka membuatnya populer di kalangan milenial dan Gen Z. Pada 2023, PDI Perjuangan resmi mengusung Ganjar sebagai calon presiden untuk Pemilu 2024, berpasangan dengan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden. Penetapan ini semakin mempertegas posisinya sebagai salah satu figur sentral dalam kontestasi politik nasional.

2.2.2. Profil Mahfud MD

Mohammad Mahfud MD merupakan politisi yang lahir pada 13 Mei 1957 di Sampang, Madura, Jawa Timur. Ia adalah anak ke-empat dari tujuh bersaudara dari pasangan Mahmodin dan Siti Khadidjah. Ayahnya bekerja sebagai pegawai rendah di kantor Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Ketika Mahfud berusia dua bulan, keluarganya pindah ke Pamekasan, yang merupakan daerah asal ibu dan keluarganya. Masa kecilnya dihabiskan di Pamekasan, dan ia mendapatkan pendidikan keagamaan sejak dini, belajar di surau dan madrasah diniyah. Mahfud menikah dengan Zaizatun Nihayati pada tahun 1982. Istilah “MD” pada namanya adalah kependekan dari nama ayahnya, Mahmodin, menjadikan namanya “Mahfud MD”.

Perjalanan pendidikan Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD dimulai dari jenjang dasar hingga pendidikan tinggi dengan pengalaman keilmuan dan keagamaan. Setelah tamat dari PGA, ia melanjutkan pendidikan menengah atas di Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) Yogyakarta, sebuah sekolah unggulan yang berada langsung di bawah Departemen Agama dan dikhususkan bagi lulusan PGA atau madrasah tsanawiyah dari seluruh Indonesia. PHIN tidak hanya membekali siswa dengan ilmu keagamaan, tetapi juga ilmu umum serta wawasan kebangsaan, yang memperluas cakrawala Mahfud tentang dunia hukum dan tata negara. Ia menyelesaikan pendidikan ini pada tahun 1978.

Keinginan untuk menekuni ilmu hukum kemudian membawa Mahfud MD ke Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, ia mengambil jurusan Hukum Tata Negara. Mahfud MD berhasil menuntaskan studi sarjana pada tahun 1983. Masa

kuliah di UII memperlihatkan kiprah awal Mahfud MD sebagai seorang intelektual muda yang kritis dan aktif dalam kegiatan akademis maupun kemahasiswaan. Di sela kesibukannya menempuh studi hukum, ia juga sempat kuliah di Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM) jurusan Sastra Arab, meskipun studi tersebut tidak ia selesaikan.

Setelah menyandang gelar sarjana hukum, ia melanjutkan studi pascasarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) dan berhasil meraih gelar Magister Ilmu Politik pada tahun 1989. Perjalanan akademiknya kemudian dituntaskan dengan gelar doktor (S3) dalam bidang Hukum Tata Negara, juga dari UGM, pada tahun 1993. Gelar doktor ini memperkuat reputasinya sebagai akademisi muda yang menaruh perhatian besar pada perkembangan demokrasi dan hukum tata negara di Indonesia, sekaligus membuka jalan baginya untuk mengabdikan sebagai dosen dan peneliti di bidang yang ia tekuni.

Karier profesional Mahfud MD mencerminkan keterpaduan antara jalur akademis, eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang jarang dimiliki tokoh lain di Indonesia. Setelah mendapatkan gelar sarjana hukum, ia mengawali kariernya menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) pada tahun 1984. Sejak saat itu, Mahfud dikenal sebagai pengajar yang aktif membimbing mahasiswa dan produktif dalam menghasilkan karya ilmiah. Reputasinya sebagai akademisi membuat ia dipercaya untuk menduduki berbagai posisi penting di universitas, salah satunya sebagai Dekan Fakultas Hukum UII.

Di luar kampus, kiprahnya mulai merambah dunia politik praktis ketika ia ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia dalam Kabinet Persatuan

Nasional pada tahun 2000. Setahun kemudian, ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM, posisi yang menuntut tanggung jawab besar di tengah dinamika reformasi pasca-1998. Pengalaman di dua kementerian ini memperkuat kapasitas Mahfud sebagai seorang teknokrat yang memahami aspek hukum sekaligus politik.

Selain itu, Mahfud juga aktif di partai politik. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada periode 2002-2005. Kiprahnya di ranah politik semakin meluas ketika ia terpilih menjadi Anggota DPR-RI. Selama di parlemen, ia pernah duduk di Komisi III yang membidangi hukum dan HAM, serta Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan komunikasi. Ia juga pernah menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, yang memperlihatkan peran pentingnya dalam pembentukan regulasi di Indonesia.

Puncak karier Mahfud MD di bidang hukum tercermin ketika ia terpilih sebagai Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam periode ini, ia dipercaya memimpin lembaga tersebut sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada 2008–2013. Jabatan ini memberinya kesempatan untuk memainkan peran sentral dalam menjaga konstitusi dan menegakkan prinsip negara hukum di Indonesia. Banyak putusan penting Mahkamah Konstitusi yang lahir di bawah kepemimpinannya, yang hingga kini menjadi referensi penting dalam praktik hukum tata negara.

Setelah selesai di MK, Mahfud MD tetap aktif di dunia akademik maupun politik. Pada 2019, ia dipercaya oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dalam Kabinet Indonesia Maju. Dalam kapasitas ini, Mahfud menjadi figur yang sering tampil di ruang publik untuk memberikan penjelasan atas berbagai isu krusial, mulai dari demokrasi, hak asasi manusia, hingga penegakan hukum. Puncaknya, pada Pemilu 2024, Mahfud MD dipilih sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, yang diusung oleh koalisi PDI-P, PPP, Hanura, dan Perindo.

2.3. Gambaran Umum Kampanye “Tabrak, Prof!”

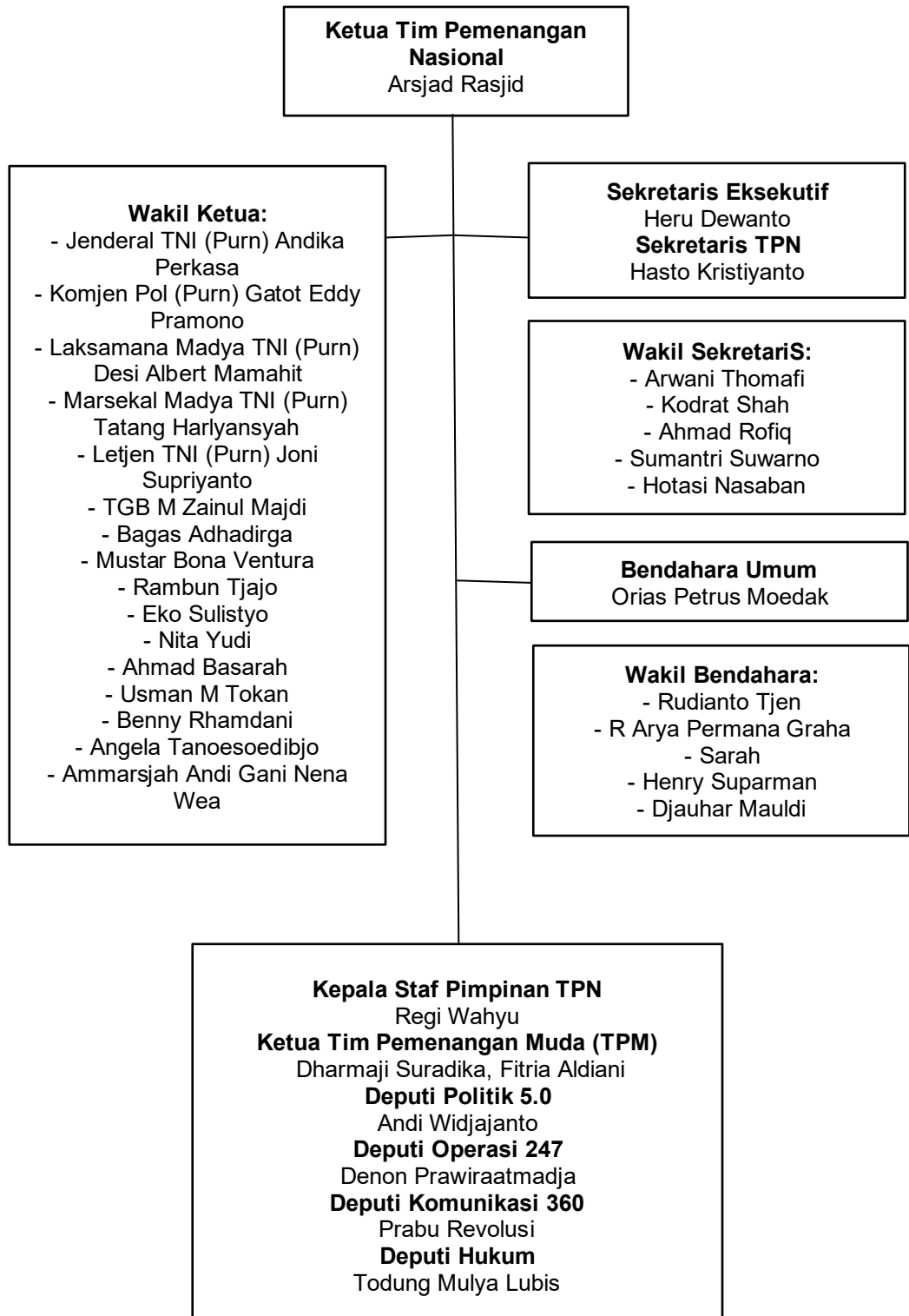
Kampanye “Tabrak, Prof!” adalah salah satu strategi yang dipakai Mahfud MD sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024 agar komunikasi dengan masyarakat menjadi lebih langsung dan informal. Ide “Tabrak, Prof!” datang dari keinginan Mahfud untuk mendekatkan diri dengan publik, terutama generasi muda, dan membuat ruang dialog yang lebih terbuka, tidak hanya monolog kampanye konvensional yang hanya mengadakan pesta rakyat atau membagikan sembako.

Kampanye Tabrak, Prof! tidak berdiri sebagai inisiatif personal yang berjalan sendiri, melainkan terintegrasi dalam kerangka kerja yang berbentuk Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebagai bagian dari strategi kampanye politik pasangan calon, pelaksanaan kampanye ini berada di bawah koordinasi struktur organisasi TPN yang memiliki pembagian tugas dan fungsi yang jelas, khususnya pada bidang komunikasi, media, dan kampanye. Dengan demikian, meskipun Tabrak, Prof! tampil dalam format yang santai, dialogis, dan tidak formal, substansi serta arah pesannya tetap selaras dengan visi, misi, dan strategi pemenangan yang dirancang secara kolektif oleh TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Struktur organisasi TPN inilah yang menjadi penopang

utama dalam memastikan kampanye tersebut berjalan sistematis, terkoordinasi, dan efektif dalam menjangkau segmen pemilih, terutama generasi muda.

STRUKTUR ORGANISASI TIM PEMENANGAN NASIONAL

GANJAR PRANOWO DAN MAHFUD MD



2.3.1 Sejarah dan Latar Belakang

Alasan Mahfud MD membuat acara “Tabrak, Prof!” antara lain adalah supaya ia dapat berbicara dan menjawab pertanyaan masyarakat secara langsung dengan lebih santai, tanpa terlalu banyak batasan protokoler yang biasa ditemui dalam kampanye formal.

Salah satu tujuannya juga yaitu menciptakan transparansi dalam setiap kegiatan pemerintahannya. Contohnya, dalam acara di Semarang, Mahfud mengatakan bahwa selama tiga bulan terakhir ia tidak memakai fasilitas pemerintahan dalam kampanye, dan meminta pejabat yang kenal dengannya untuk tidak menjemput atau melayani kunjungannya dalam kegiatan kampanye agar netralitas tetap terjaga.

Tujuan lainnya adalah memperlihatkan bahwa sebagai calon wakil presiden ia mau menjadi figur yang dekat, responsif, dan bisa mendengarkan langsung keluhan atau aspirasi rakyat. “Tabrak, Prof!” juga sebagai upaya membangun kepercayaan bahwa jabatan publik tidak dipakai sebagai alat politik semata.

2.3.2 Bentuk dan Pelaksanaan

Acara “Tabrak, Prof!” sendiri biasanya berbentuk dialog publik, tanya jawab, dan konsultasi hukum atau aspirasi masyarakat. Misalnya, pada 23 Januari 2024 di Semarang Jawa Tengah, Mahfud menggelar diskusi dimana masyarakat bisa langsung bertanya kepadanya, dan ia menjawab secara langsung lewat akun media sosial resmi. Selain Kota Semarang, kampanye ini juga digelar di Jakarta dan beberapa kota lain. Kampanye ini dimeriahkan warga yang menyampaikan beragam aspirasi ke Mahfud MD secara langsung.



Gambar 2.3.1. Visualisasi Suasana Kampanye Tabrak, Prof!

Sumber: Kanal YouTube Mahfud MD

Media sosial juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan “Tabrak, Prof!” Acara-acara tersebut disiarkan secara langsung lewat kanal media sosial milik Mahfud MD, seperti YouTube atau *platform* lainnya, supaya masyarakat yang tidak hadir secara fisik tetap bisa ikut dan melihat. Hal ini merupakan strategi dalam kampanye untuk memanfaatkan media sosial YouTube. Kampanye ini tidak hanya disiarkan melalui kanal YouTube Mahfud MD, tetapi juga disiarkan di kanal YouTube milik Metro TV.

2.3.3. Strategi dan Signifikansi dalam Konteks Media Sosial

Media sosial menjadi sarana utama agar “Tabrak, Prof!” bisa menjangkau banyak orang sekaligus. Dengan streaming langsung dan penyebaran video atau cuplikan dari acara dialog, aspirasi masyarakat, jawaban Mahfud MD, dan citra bahwa ia seorang figur yang terbuka, bisa disebarkan lebih luas. Ini penting

terutama karena pemilih muda di Indonesia makin banyak yang mengikuti informasi melalui *platform* digital.

Strateginya juga mencakup penggunaan momen-moment tertentu seperti berita debat, kritikan publik, atau tuntutan netralitas pejabat publik untuk menegaskan komitmennya. Misalnya, “Tabrak, Prof!” iadakan setelah debat cawapres, dan Mahfud menyebut bahwa ia akan mundur dari jabatan ketika saatnya tepat, sebagai bentuk konsistensi dengan komitmennya terhadap netralitas.